

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Menurut Pengeluaran

KABUPATEN BONDOWOSO

2017 - 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BONDOWOSO**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Menurut Pengeluaran

KABUPATEN BONDOWOSO

2017 - 2021



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BONDOWOSO MENURUT PENGELUARAN 2017-2021

ISSN : 2776-8732

Nomor Publikasi : 35110.2203

Katalog BPS : 9302020.3511

Ukuran Buku : 21,0 cm x 29,7 cm

Jumlah halaman : x + 60 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso

Ilustrasi cover:

Wisata Kawah Ijen (<https://rri.co.id/>)

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso

Dicetak Oleh:

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum:
Mohamad Isma'il, S.Si, M.Ec.Dev

Penyunting:
Lucy Efendi, SST

Penulis:
Eko Nugroho, SST

Pengolah Data:
Eko Nugroho, SST

Gambar Kulit:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

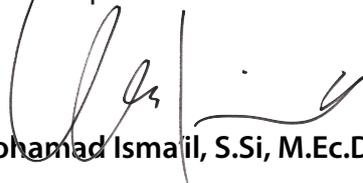
KATA PENGANTAR

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nations.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bondowoso, April 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bondowoso



Mohamad Ismail, S.Si, M.Ec.Dev

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Produk Domestik regional Bruto (PDRB)	3
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	5
BAB 2 METODE ESTIMASI & SUMBER DATA.....	11
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)	13
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani rumah Tangga (PK-LNPRT).....	15
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)	17
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	19
2.5 Perubahan Inventori (PI).....	21
2.6 Ekspor Impor.....	24
BAB 3 TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BONDOWOSO MENURUT PENGELUARAN	25
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Bondowoso Menurut Pengeluaran	27
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	30
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	32
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah.....	33
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB).....	34
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori.....	36
3.7 Perkembangan Net Ekspor	37
BAB 4 PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN BONDOWOSO MENURUT PENGELUARAN	41
4.1 PDRB (Nominal)	43
4.2 Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	44
4.3 Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB	45
4.4 Incremental Capital Output Ratio (ICOR).....	46
BAB 5 PENUTUP.....	49
LAMPIRAN.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bondowoso (Miliar Rp), 2017 - 2021	28
Tabel 3.2	PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bondowoso, (Miliar Rp), 2017 - 2021	28
Tabel 3.3	Distribusi PDRB Kabupaten Bondowoso Menurut Pengeluaran (Persen), 2017 - 2021	29
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bondowoso Menurut Pengeluaran (Persen), 2017 - 2021	30
Tabel 3.5	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bondowoso, 2017-2021.....	31
Tabel 3.6	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Kabupaten Bondowoso, 2017-2021.....	33
Tabel 3.7	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bondowoso, 2017-2021.....	33
Tabel 3.8	Perkembangan PMTB Kabupaten Bondowoso, 2017-2021	35
Tabel 3.9	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Bondowoso, 2017-2021.....	37
Tabel 3.10	Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Bondowoso, 2017-2021	38
Tabel 4.1	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kabupaten Bondowoso, 2017-2021.....	43
Tabel 4.2	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Bondowoso, 2017-2021.....	44
Tabel 4.3	Rasio Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB Kabupaten Bondowoso, 2017-2021.....	45
Tabel 4.4	Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Bondowoso, 2017-2021	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Bondowoso (Miliar Rp), 2017 - 2021	29
----------	---	----

<https://bondowosokab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bondowoso atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rp), 2017 - 2021	55
Lampiran 2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bondowoso atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rp), 2017 - 2021	56
Lampiran 3	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bondowoso atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2017 - 2021	57
Lampiran 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bondowoso atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2017 - 2021	58
Lampiran 5	Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bondowoso Menurut Pengeluaran (Persen), 2017 - 2021	59
Lampiran 6	Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bondowoso Menurut Pengeluaran (Persen), 2017 - 2021	60

BAB

1

PENDAHULUAN

<https://bondowosokab.bps.go.id>

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Produk Domestik regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, disamping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (frame work) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (basic measure) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (product) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (expenditure) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (production). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi). Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (supply side) dan sisi permintaan (demand side) barang dan jasa.

Secara konsep penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (equivalent). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (statistical discrepancy).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (output) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak memperlakukan adanya perbedaan (statistical discrepancy) tersebut.

Penyusunan data PDRB Pengeluaran juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “output akhir (final output)”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki

jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan Keynesian sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (Income)	=	PDRB Produksi
C (Consumption)	=	Konsumsi akhir
GFCF (Gross Fixed Capital Formation)	=	Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	=	Perubahan Inventori
X	=	Ekspor
M	=	Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan "identik" dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (external transaction). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai "ekspor neto" .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan "riil", serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan

perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari System of National Accounts (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk Supply and Use Tables (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (benchmark) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (account) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- » Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- » Meningkatkan kualitas PDRB;
- » Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- » Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- » Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- » Perubahan input data untuk keperluan modeling dan forecasting.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- » Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- » Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- » Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun ;
- » Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- » Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (Producers Price Index);
- » Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- a. Konsep dan Cakupan
 - » Sumber daya hayati (cultivated biological resources/CBR). CBR

merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.

- » Sistem persenjataan (military weapon systems/MWS). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
- » Penelitian dan pengembangan (research and development/RnD). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- » Eksplorasi dan evaluasi mineral (mineral exploration and evaluation/MEE). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- » Bank Sentral (Central Bank/CB). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- » Komputer software (computer software and databases/CSD). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan databases, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- » Produk kekayaan intelektual (entertainment, literary or artistic originals/ELA). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- » pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

b. Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (Financial intermediation services indirectly measured / FISIM). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (deposits), bunga pinjaman (loans), dan suku bunga referensi (reference). Metoda ini menggantikan metoda Imputed Bank Services Charge (IBSC).

c. Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (Basic Price). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

d. Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000		PDRB Tahun Dasar 2010	
(1)		(2)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga		1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah		2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto		3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	
4. Perubahan Inventori		4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	
5. Ekspor		5. Perubahan Inventori	
6. Impor		6. Ekspor	
		7. Impor	

BAB

2

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://bondowosokab.go.id>

METODE ESTIMASI & SUMBER DATA

2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)

Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan

11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Pereengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya
8. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

1. Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
2. Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
3. Sensus Penduduk 2010, BPS
4. Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
5. Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota

terdekat);

7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani rumah Tangga (PK-LNPRT)

Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

1. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
2. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
3. Penyusutan
4. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

Sumber Data

1. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
2. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
3. Hasil up-dating direktori LNPRT, BPS
4. Indeks Harga Konsumen, BPS

Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh

dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)

Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.

Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam parktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya

yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

1. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
2. Statistik Keuangan Daerah, BPS
3. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
4. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
5. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
6. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

PK-P atas dasar harga Berlaku = Output – Penjualan barang dan jasa + Social transfer in kind purchased market production + Output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

- » Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
- » PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-deflate PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (financial leasing) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (Cultivated Biological Resources/CBR). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (financial leasing) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (Consumption of Fixed Capital) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (cultivated asset),

- produk kekayaan intelektual (intellectual property products);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
 3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalan (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

1. Metoda Langsung:

$$\text{PMTB_ADHB (Domestik)} = \text{Barang Modal Domestik} + \text{TTM} + \text{Pajak atas Produk (PPN)} + \text{Biaya Instalasi}$$

$$\text{PMT_ADHB (Impor)} = \text{Barang Modal Impor} + \text{TTM} + \text{Bea Impor} + \text{Biaya Instalasi}$$

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-deflate PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$\text{PMTB_ADHK} = \text{PMTB_ADHB/IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

2. Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply :

$$\text{PMTB_ADHB} = \text{Total Supply Barang} \times \text{Rasio PMTB}$$

Pendekatan Ekstrapolasi :

$$\text{PMT_ADHK} (t) = \text{PMTB atas dasar harga} (t-1) \times \text{Indeks Produksi} (t)$$

2.5 Perubahan Inventori (PI)

Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (intermediate consumption) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (work in progress), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di

akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

1. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
2. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (material & supplies), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
3. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
4. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
5. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
6. Ternak untuk tujuan dipotong;
7. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
8. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

1. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$\text{PI_ADHB} = (\text{Volume Inventori (t)} - \text{Volume inventori (t-1)}) \times \text{Harga per unit}$$

$$\text{P_ADHK} = \text{PI atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB}$$

2. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\text{PI_ADHK} = \frac{\text{Inventori (t)_ADHB}}{\text{IHPB (t)}} - \frac{\text{Inventori (t-1) ADHB}}{\text{IHPB (t-1)}}$$

$$\text{PI_ADHB} = \text{PI_ADHK} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$$

2.6 Ekspor Impor

Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impur dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impur dari dan ke suatu wilayah.

Konsep dan definisi

Ekspor-impur didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

Cakupan

Ekspor-Impur ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

1. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
2. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.
3. Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

Sumber Data

Nilai ekspor-impur wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

BAB

3

**TINJAUAN
PEREKONOMIAN**
KABUPATEN BONDOWOSO
MENURUT PENGELUARAN

<https://bondowosokab.go.id>

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BONDOWOSO MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2017 - 2021

Proses pembangunan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Bondowoso pada periode 2017 sampai dengan 2021 mengakibatkan perubahan struktur ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Bondowoso digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPR, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 Tinjauan Agregat PDRB Bondowoso Menurut Pengeluaran

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan System of National Accounts (SNA) yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Selama kurun waktu 2017-2021, gambaran tentang perkembangan ekonomi Bondowoso berdasarkan PDRB ADHB dapat dilihat pada tabel 3.1. Sama halnya dengan PDRB ADHB, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan (tabel 3.2). Nilai PDRB ADHB lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam penghitungan PDRB ADHB. Dalam PDRB ADHK pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Nilai PDRB ADHB Bondowoso selama kurun waktu 2017 hingga 2021

mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, PDRB ADHB Bondowoso mencapai 17.126,69 miliar rupiah. Dalam rentang lima tahun, nilai tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai 21.052,23 miliar rupiah pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terjadi pada hampir seluruh komponen pembentuknya mulai dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, dan PMTB. Meskipun pada tahun 2020, sempat terjadi penurunan pada komponen konsumsi pemerintah dan PMTB.

Tabel 3.1
PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bondowoso (Miliar Rp), 2017 - 2021

Komponen Pengeluaran		2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	12 302.41	13 344.51	14 323.31	14 519.81	15 493.53
2	Konsumsi LNPRT	310.54	344.60	371.55	377.83	387.11
3	Konsumsi Pemerintah	1 753.17	1 919.43	2 068.08	2 028.19	2 055.98
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4 753.83	5 106.05	5 504.77	5 268.03	5 436.89
5	Perubahan Inventori	188.87	203.89	211.21	67.53	135.56
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-2 182.13	-2 423.67	-2 624.87	-2 325.80	-2 456.84
Produk Domestik Regional Bruto		17 126.69	18 494.81	19 854.05	19 935.59	21 052.23

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Meskipun PDRB ADHB Bondowoso mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi lima tahun lalu, namun tidak demikian pada PDRB ADHK Bondowoso. Penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19 terlihat dari nilai PDRB ADHK tahun 2020 yang sudah tidak ada pengaruh faktor harga di dalamnya.

Tabel 3.2
PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bondowoso (Miliar Rp), 2017 - 2021

Komponen Pengeluaran		2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	9 212.84	9 628.15	10 097.97	10 068.44	10 515.73
2	Konsumsi LNPRT	220.75	235.83	251.33	254.19	257.99
3	Konsumsi Pemerintah	1 098.38	1 141.87	1 184.81	1 127.52	1 132.05
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3 141.42	3 310.96	3 495.23	3 276.04	3 303.25
5	Perubahan Inventori	95.77	96.77	98.61	31.14	61.08
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-1 443.50	-1 462.07	-1 490.58	-1 305.56	-1 348.45
Produk Domestik Regional Bruto		12 325.66	12 951.52	13 637.36	13 451.77	13 921.65

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB ADHK Bondowoso dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, PDRB ADHK Bondowoso mencapai 12.325,66 miliar rupiah. Kemudian dalam rentang lima tahun, nilai tersebut telah meningkat menjadi 13.921,65 miliar rupiah pada tahun 2021. Namun, jika dibandingkan tahun 2019, nilai PDRB ADHK tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

Gambar 1
Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Bondowoso (Miliar Rp), 2017 - 2021



*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Pembentukan nilai PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, ekspor luar negeri, impor luar negeri dan net ekspor antar daerah atau ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah.

Tabel 3.3
Distribusi PDRB Kabupaten Bondowoso Menurut Pengeluaran (Persen), 2017 - 2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	71.83	72.15	72.14	72.83	73.59
2 Konsumsi LNPRT	1.81	1.86	1.87	1.90	1.84
3 Konsumsi Pemerintah	10.24	10.38	10.42	10.17	9.77
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	27.76	27.61	27.73	26.43	25.83
5 Perubahan Inventori	1.10	1.10	1.06	0.34	0.64
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-12.74	-13.10	-13.22	-11.67	-11.67
Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Bondowoso dari tahun 2017 hingga 2021 selalu tumbuh di atas 3 persen kecuali tahun 2020, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,03 persen (2017); 5,08 persen (2018); 5,30 persen (2019); -1,36 persen (2020) dan 3,49 persen (2021). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 5,30 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang mencapai -1,36 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 disebabkan oleh terhambatnya kinerja ekonomi akibat wabah Covid-19 yang menerpa berbagai wilayah.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bondowoso Menurut Pengeluaran (Persen), 2017 - 2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	4.68	4.51	4.88	-0.29	4.44
2 Konsumsi LNPRT	2.26	6.83	6.57	1.14	1.50
3 Konsumsi Pemerintah	2.18	3.96	3.76	-4.84	0.40
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.91	5.40	5.57	-6.27	0.83
5 Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto	5.03	5.08	5.30	-1.36	3.49

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Konsumsi akhir rumah tangga secara struktur menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 3.5 menunjukkan, jika dibandingkan kondisi lima tahun yang lalu, konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan baik dalam nominal maupun riil, sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3.5
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bondowoso, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	12 302.41	13 344.51	14 323.31	14 519.81	15 493.53
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	9 212.84	9 628.15	10 097.97	10 068.44	10 515.73
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	71.83	72.15	72.14	72.83	73.59
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (ribu Rp)					
a. ADHB (Ribu Rp)	15 999.76	17 278.99	18 456.73	18 722.41	19 901.13
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	11 981.66	12 466.90	13 012.04	12 982.64	13 507.25
Pertumbuhan (persen)					
a Total Konsumsi Rumah Tangga	4.68	4.51	4.88	-0.29	4.44
b Konsumsi Per Kapita	4.16	4.05	4.37	-0.23	4.04
Jumlah penduduk (Jiwa)	768 912	772 297	776 048	775 531	778 525

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB selama periode tahun 2017 hingga 2021 cenderung mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2018 - 2019 yang mengalami penurunan tipis dari 72,15 persen menjadi 72,14 persen. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan porsi mencapai 73,59 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 72,14 persen.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK selama periode 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan, namun mengalami kontraksi pada tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 4,88 persen, sedangkan pada tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar 0,29 persen.

Pandemi Covid-19 yang terjadi selama tahun 2020 berdampak pada terkontraksinya konsumsi rumah tangga pada tahun tersebut. Selama pandemi terjadi, masyarakat cenderung untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan primer dan menunda konsumsi kebutuhan sekunder ataupun tersier. Pengurangan konsumsi ini juga didorong oleh adanya indikasi penurunan pendapatan masyarakat sebagai akibat terhambatnya kinerja ekonomi serta ruang gerak masyarakat selama pandemi.

Rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh perubahan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita selama tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan, baik ADHB maupun ADHK 2010, namun pada tahun 2020 ADHK mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa, pada periode sebelum ada Pandemi Covid-19, rata-rata konsumsi setiap penduduk

di Bondowoso mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per kapita secara "riil" dalam rentang periode 2017 hingga 2019 berkisar antara 4,05 persen hingga 4,37 persen.

Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga. Namun, semenjak wabah virus Covid-19 melanda Bondowoso, mulai pada akhir kuartal pertama tahun 2020, rata-rata konsumsi per kapita tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar -0,23 persen.

3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT

Peranan konsumsi akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dalam PDRB menurut pengeluaran sangatlah kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan peranan LNPRT dalam perekonomian yang dilihat dari proporsinya terhadap total PDRB.

Selama periode tahun 2017-2021 konsumsi LNPRT baik secara ADHB maupun ADHK 2010 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 konsumsi LNPRT atas dasar harga berlaku mencapai 310,54 miliar rupiah kemudian meningkat menjadi 344,60 miliar rupiah (2018); 371,55 miliar rupiah (2019); 377,83 miliar rupiah (2020) dan 387,11 miliar rupiah (2021). Demikian pula dengan konsumsi LNPRT yang dinilai atas dasar harga konstan 2010 juga mengalami peningkatan. Konsumsi LNPRT ADHK pada tahun 2017 mencapai 220,75 miliar rupiah kemudian meningkat menjadi 235,83 miliar rupiah (2018); 251,33 miliar rupiah (2019); 254,19 miliar rupiah (2020) dan terus meningkat hingga mencapai 258,00 miliar rupiah pada tahun 2021.

Proporsi konsumsi LNPRT dalam rentang waktu lima tahun terakhir relatif kecil, dengan kontribusi di bawah dua persen. Proporsi konsumsi LNPRT terhadap PDRB Bondowoso pada tahun 2017 hingga 2021 relatif stabil dengan kisaran 1,81 sampai 1,90 persen. Peningkatan ini didorong oleh kegiatan berbagai lembaga kemanusiaan selama masa pandemi Covid-19 juga turut berpengaruh pada tingkat konsumsi LNPRT pada tahun tersebut.

Tabel 3.6
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Kabupaten Bondowoso, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	310.54	344.60	371.55	377.83	387.11
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	220.75	235.83	251.33	254.19	257.99
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	1.81	1.86	1.87	1.90	1.84

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah

Dalam perekonomian suatu wilayah, pemerintah memegang peranan yang penting. Untuk menjalankan roda perekonomian, unit pemerintah dapat berperan dalam aktivitas konsumsi barang dan jasa, aktivitas produksi barang dan jasa serta investasi, dan juga berperan sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan baik di bidang fiskal maupun moneter.

Tabel 3.7
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bondowoso, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	1 753.17	1 919.43	2 068.08	2 028.19	2 055.98
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1 098.38	1 141.87	1 184.81	1 127.52	1 132.05
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	10.24	10.38	10.42	10.17	9.77
Rata-rata konsumsi Pemerintah per-kapita/tahun (ribu Rp)					
a. ADHB (Ribu Rp)	2 280.07	2 485.35	2 664.89	2 615.23	2 640.87
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	1 428.49	1 478.54	1 526.72	1 453.87	1 454.10
Pertumbuhan (persen)					
a Total Konsumsi Pemerintah	2.18	3.96	3.76	-4.84	0.40
b Konsumsi Per Kapita	1.67	3.50	3.26	-4.77	0.02
Jumlah penduduk (Jiwa)	768 912	772 297	776 048	775 531	778 525

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Dalam rentang lima tahun terakhir, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan kecenderungan peningkatan baik secara ADHB maupun ADHK 2010, hanya pada tahun 2020 yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 1.753,17 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 2.055,98 miliar rupiah tahun 2021. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah ADHK 2010, yang juga mengalami peningkatan dalam rentang waktu tersebut dari 1.098,38 miliar rupiah (2017) menjadi 1.132,05 miliar rupiah (2021). Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Kontribusi konsumsi pemerintah terhadap perekonomian Bondowoso relatif stabil sepanjang tahun 2017 hingga 2021 dengan peranan sebesar 9,77-10,42 persen per tahun. Sepanjang periode ini, peran pemerintah cenderung turun dari 10,24 persen pada tahun 2017, kemudian terus bertambah setiap tahunnya hingga menyentuh angka 9,77 persen pada tahun 2021.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Peningkatan konsumsi pemerintah seyogyanya juga diikuti oleh peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2017 konsumsi pemerintah per kapita ADHB sebesar 2.280,07 ribu rupiah kemudian naik menjadi 2.640,87 ribu rupiah pada tahun 2021.

Meskipun mengalami peningkatan jika dibandingkan lima tahun lalu, namun konsumsi pemerintah tahun 2020 lebih rendah apabila dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2020 nilai konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010 turun -4,84 persen. Sementara itu nilai konsumsi pemerintah per kapita turun -4,77 persen. Kontraksi konsumsi pemerintah pada tahun 2020 dikarenakan oleh terhambatnya realisasi anggaran pemerintah akibat pembatasan ruang gerak selama masa Pandemi Covid-19 serta adanya kebijakan realokasi anggaran pemerintah dalam rangka penanganan wabah.

3.5 Perkembangan Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi fisik. Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah

Tabel 3.8
Perkembangan PMTB Kabupaten Bondowoso, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	4 753.83	5 106.05	5 504.77	5 268.03	5 436.89
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	3 141.42	3 310.96	3 495.23	3 276.04	3 303.25
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	27.76	27.61	27.73	26.43	25.83
Struktur PMTB					
a. Bangunan (Miliar Rp)	3 709.77	3 962.93	4 269.66	4 068.98	4 214.47
(%)	78.04	77.61	77.56	77.24	77.52
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	1 044.06	1 143.12	1 235.11	1 199.05	1 222.42
(%)	21.96	22.39	22.44	22.76	22.48
Total PMTB (Miliar Rp)	4 753.83	5 106.05	5 504.77	5 268.03	5 436.89
(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Pertumbuhan (persen)					
a. Bangunan	6.08	5.38	5.21	-6.23	0.98
b. Non Bangunan	5.38	5.45	6.65	-6.39	0.38
Total PMTB	5.91	5.40	5.57	-6.27	0.83

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Dalam kurun waktu lima tahun, nilai PMTB Bondowoso cenderung meningkat, hanya pada tahun 2020 yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Jika dinilai ADHB, PMTB Bondowoso naik dari 4.753,83 miliar rupiah (2017) menjadi 5.436,89 miliar rupiah (2021) dan jika dinilai ADHK 2010, naik dari 3.141,42 miliar rupiah (2017) menjadi 3.303,25 miliar rupiah (2021).

Kontribusi PMTB terhadap perekonomian Bondowoso cukup besar. Sumbangan komponen ini berkisar antara 25-27 persen dari total PDRB. Dari sisi pertumbuhan riil, sepanjang tahun 2017 hingga 2019, PMTB selalu tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 5,91 persen. Namun, pada tahun 2020 kinerja PMTB terhambat oleh merebaknya virus Covid-19 di seluruh wilayah. Hal ini menyebabkan komponen PMTB berkontraksi sebesar sebesar 6,27 persen.

Ditinjau menurut jenisnya, PMTB dibedakan menjadi 2 jenis aset, yakni bangunan dan non bangunan. Struktur PMTB Bondowoso sepanjang tahun

2017 hingga 2021 didominasi oleh PMTB bangunan. Proporsi PMTB bangunan terhadap total PMTB berkisar sekitar 77-78 persen setiap tahunnya. Kinerja PMTB bangunan tahun 2017 hingga 2019 cukup baik dengan pertumbuhan riil selalu di atas 5 persen setiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi tercipta pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 6,08 persen. Pandemi Covid-19 yang melanda Bondowoso selama tahun 2020 turut menghambat proses pembangunan beberapa proyek infrastruktur, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Terhambatnya proses konstruksi ini berdampak pada terbatasnya penciptaan aset fisik pada tahun tersebut. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan riil PMTB bangunan mengalami kontraksi mencapai 4,70 persen.

Dalam lima tahun terakhir, PMTB non bangunan memberikan kontribusi sekitar 22 persen terhadap ekonomi Bondowoso setiap tahunnya. Pada tahun 2017 hingga 2019, pertumbuhan PMTB non bangunan mampu tumbuh positif, dengan pertumbuhan tertinggi tercipta pada tahun 2019 sebesar 6,65 persen. Kemudian pada tahun 2020, PMTB non bangunan mengalami kontraksi sebesar 2,92 persen. Selama tahun 2020, banyak wilayah membatasi interaksi dengan wilayah luar untuk mencegah penularan virus semakin masif. Terbatasnya interaksi ini turut menghambat pemenuhan barang-barang modal dalam wilayah Bondowoso, terutama barang modal yang berasal dari luar wilayah.

3.6 Perkembangan Perubahan Inventori

Perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk persediaan berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif). Barang persediaan bisa berupa barang jadi, barang setengah jadi, bahan baku, maupun bahan penolong.

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (di samping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 3.9
Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Bondowoso, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a ADHB (Miliar Rp)	188.87	203.89	211.21	67.53	135.56
b ADHK 2010 (Miliar Rp)	95.77	96.77	98.61	31.14	61.08
Proporsi terhadap PDRB % ADHB	1.10	1.10	1.06	0.34	0.64

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah bahwa proporsi perubahan inventori dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Nilai perubahan inventori Bondowoso tahun 2017 sebesar 188,87 miliar rupiah jika dinilai atas dasar harga berlaku dan 95,77 miliar rupiah jika dinilai atas dasar harga konstan 2010. Nilai perubahan inventori cenderung stabil hingga tahun 2019 dengan kontribusi terhadap total PDRB sekitar 1 persen setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 kontribusi perubahan inventori mengalami penurunan dari 1,06 persen (2019) menjadi 0,34 persen. Penurunan ini didorong oleh pelemahan kegiatan ekonomi Bondowoso selama masa pandemi Covid-19. Terhambatnya pasokan barang, baik dari luar negeri dan luar kabupaten berdampak pada penurunan nilai perubahan inventori. Selain itu, pemenuhan barang untuk konsumsi domestik dalam dan luar kabupaten juga turut berpengaruh terhadap kondisi perubahan inventori Bondowoso sepanjang tahun 2020.

3.7 Perkembangan Net Ekspor

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari

pada impor antar daerahnya, demikian pula sebaliknya.

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Bondowoso tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Bondowoso. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB ekspor dengan nilai impornya.

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Bondowoso di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Bondowoso terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri.

Tabel 3.10
Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Bondowoso, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a ADHB (Miliar Rp)	-2 182.13	-2 423.67	-2 624.87	-2 325.80	-2 456.84
b ADHK 2010 (Miliar Rp)	-1 443.50	-1 462.07	-1 490.58	-1 305.56	-1 348.45
Proporsi terhadap PDRB % ADHB	-12.74	-13.10	-13.22	-11.67	-11.67

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 3.13, baik secara harga berlaku maupun harga konstan 2010, nilai net ekspor Kabupaten Bondowoso bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi ekspor barang jasa lebih kecil dibandingkan nilai ekonomi impornya.

Secara total, dalam kurun waktu 2017-2021 nilai net ekspor antar daerah menunjukkan tren yang berfluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2017, nilai net ekspor antar daerah sebesar -2.182,13 miliar rupiah, kemudian turun menjadi -2.423,67 miliar pada tahun 2018. Pada tahun berikutnya nilai net ekspor barang dan jasa masih mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi -2.624,87 miliar rupiah. Menuju tahun 2020 net ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 dan 2019 hingga mencapai -2.325,80 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2021, net ekspor barang dan jasa mengalami penurunan kembali menjadi -2.456,84 miliar rupiah.

Dalam lima tahun terakhir, nilai net ekspor atas dasar harga Konstan 2010, menunjukkan arah yang sama sebagaimana perkembangan nilai net ekspor atas dasar harga Berlaku. Pada tahun 2017 nilai net ekspor barang jasa atas dasar harga konstan 2010 sebesar -1.443,50 miliar rupiah dan mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 menjadi -1.490,58 miliar rupiah. Pada tahun 2020, nilai net ekspor barang jasa atas dasar harga konstan 2010 meningkat menjadi -1.305,56 miliar rupiah dan menurun kembali pada tahun 2021 menjadi -1.348,45 miliar rupiah.

BAB

4

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB

KABUPATEN BONDOWOSO
MENURUT PENGELUARAN

<https://bondowosokab.go.id/>

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN BONDOWOSO MENURUT PENGELUARAN

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (Nominal)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Bondowoso, namun di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah (produksi), pengeluaran, dan pendapatan.

Tabel 4.1
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kabupaten Bondowoso, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB					
a. ADHB (Miliar Rp)	17 126.69	18 494.81	19 854.05	19 935.59	21 052.23
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	12 325.66	12 951.52	13 637.36	13 451.77	13 921.65
Pertumbuhan PDRB (Persen)	5.03	5.08	5.30	-1.36	3.49
PDRB per Kapita/tahun (ribu Rp)					
a. ADHB (Ribu Rp)	22 273.93	23 947.79	25 583.53	25 705.73	27 041.17
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	16 030.00	16 770.13	17 572.83	17 345.24	17 882.08
Pertumbuhan PDRB per Kapita	4.51	4.62	4.79	-1.30	3.10
Jumlah Penduduk (Jiwa)	768 912	772 297	776 048	775 531	778 525
Pertumbuhan Penduduk (Persen)	0.50	0.44	0.49	-0.07	0.39

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB per kapita. Dalam kurun waktu tahun 2017-2021, PDRB per kapita Kabupaten Bondowoso menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Bondowoso rata-rata mampu menciptakan PDRB (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Selama kurun waktu tahun 2017-2019, pertumbuhan PDRB per kapita secara “riil” mampu tumbuh di atas empat persen. Disisi lain, perkembangan ekonomi yang terjadi diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat secara rata-rata di bawah satu persen setiap tahunnya, atau lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita. Sementara pada tahun 2020, pertumbuhan PDRB per kapita secara “riil” mengalami kontraksi akibat Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi.

4.2 Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.2
Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Bondowoso, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir ADHB (Miliar Rp)					
a. Rumah Tangga	12 302.41	13 344.51	14 323.31	14 519.81	15 493.53
b. LNPRT	310.54	344.60	371.55	377.83	387.11
c. Pemerintah	1 753.17	1 919.43	2 068.08	2 028.19	2 055.98
Total konsumsi Akhir (Miliar Rp)	14 366.12	15 608.54	16 762.94	16 925.83	17 936.62
PDRB ADHB (Miliar Rp)	17 126.69	18 494.81	19 854.05	19 935.59	21 052.23
Proporsi terhadap PDRB (Persen)	83.88	84.39	84.43	84.90	85.20

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah Bondowoso digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Hal ini tercermin dari proporsi permintaan akhir yang berada di sekitar 83-85 persen. Jika diperhatikan selama lima tahun terakhir, proporsi konsumsi akhir meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 proporsi konsumsi akhir terhadap PDRB mencapai 83,88 persen dan meningkat terus sampai pada tahun 2021 mencapai 85,20 persen. Laju peningkatan tersebut disebabkan oleh perubahan volume dan juga harga.

4.3 Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap bruto). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Bondowoso digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 4.3
Rasio Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB Kabupaten Bondowoso, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Total Konsumsi Rumah Tangga ADHB (Miliar Rp)	12 302.41	13 344.51	14 323.31	14 519.81	15 493.53
b. Total PMTB ADHB (Miliar Rp)	4 753.83	5 106.05	5 504.77	5 268.03	5 436.89
Rasio Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PMTB (Persen)	2.59	2.61	2.60	2.76	2.85

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa rasio konsumsi akhir rumah tangga terhadap PMTB cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB adalah sebesar 2,59, kemudian mulai berfluktuasi pada tahun-tahun berikutnya. Tercatat rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB pada tahun 2018 hingga 2021 masing-masing sebesar 2,61; 2,60; 2,76; dan 2,85. Peningkatan rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB hingga tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan nilai investasi fisik.

4.4 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sementara output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap penambahan satu unit nilai output (keluaran) maka akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Penghitungan ICOR menggunakan formula sebagai berikut.

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana:

- I_t = PMTB tahun ke t
- Y_t = Output tahun ke t
- Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Selama periode tahun 2017-2019, besaran ICOR relatif stabil pada sekitar lima point dengan kecenderungan turun. Hal ini berarti setiap penambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak 5 unit. ICOR Kabupaten Bondowoso selama periode 2017-2019 tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan nilai 5,32. Sedangkan pada tahun 2020, nilai ICOR Kabupaten Bondowoso bernilai negatif. Kondisi ini terjadi karena output yang dihasilkan selama tahun 2020 lebih kecil dibandingkan dengan output yang dihasilkan pada tahun sebelumnya, meskipun investasi fisik masih terbentuk pada tahun tersebut. Penurunan nilai output ini disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19 yang menghambat kinerja perekonomian Bondowoso. Akan tetapi, pada tahun 2021, nilai ICOR menguat kembali hingga 7,03.

Tabel 4.4
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Bondowoso, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rp)	12 325.66	12 951.52	13 637.36	13 451.77	13 921.65
Perubahan (Miliar Rp)	590.08	625.86	685.84	-185.59	469.88
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	3 141.42	3 310.96	3 495.23	3 276.04	3 303.25
ICOR	5.32	5.29	5.10	-17.65	7.03

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

<https://bondosokab.bps.go.id>

BAB

5

PENUTUP

<https://bondowosokab.bps.go.id>

PENUTUP

1. PDRB menurut Pengeluaran tahun 2017-2021 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Bondowoso pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku pengeluaran barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri serta perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti jumlah penduduk) sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2017-2021, sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Bondowoso terhadap ekonomi daerah lain.



LAMPIRAN

<https://bondowosokab.bps.go.id>

Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bondowoso Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rp), 2017 - 2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	12 302.41	13 344.51	14 323.31	14 519.81	15 493.53
2 Konsumsi LNPR	310.54	344.60	371.55	377.83	387.11
3 Konsumsi Pemerintah	1 753.17	1 919.43	2 068.08	2 028.19	2 055.98
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	4 753.83	5 106.05	5 504.77	5 268.03	5 436.89
5 Perubahan Inventori	188.87	203.89	211.21	67.53	135.56
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-2 182.13	-2 423.67	-2 624.87	-2 325.80	-2 456.84
Produk Domestik Regional Bruto	17 126.69	18 494.81	19 854.05	19 935.59	21 052.23

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

<https://bondowosokab.bps.go.id>

Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bondowoso Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rp), 2017 - 2021

Komponen Pengeluaran		2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	9 212.84	9 628.15	10 097.97	10 068.44	10 515.73
2	Konsumsi LNPRT	220.75	235.83	251.33	254.19	257.99
3	Konsumsi Pemerintah	1 098.38	1 141.87	1 184.81	1 127.52	1 132.05
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3 141.42	3 310.96	3 495.23	3 276.04	3 303.25
5	Perubahan Inventori	95.77	96.77	98.61	31.14	61.08
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-1 443.50	-1 462.07	-1 490.58	-1 305.56	-1 348.45
Produk Domestik Regional Bruto		12 325.66	12 951.52	13 637.36	13 451.77	13 921.65

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 3 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bondowoso Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2017 - 2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	71.83	72.15	72.14	72.83	73.59
2 Konsumsi LNPRT	1.81	1.86	1.87	1.90	1.84
3 Konsumsi Pemerintah	10.24	10.38	10.42	10.17	9.77
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	27.76	27.61	27.73	26.43	25.83
5 Perubahan Inventori	1.10	1.10	1.06	0.34	0.64
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-12.74	-13.10	-13.22	-11.67	-11.67
Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

<https://bondowosokab.bps.go.id>

Lampiran 4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bondowoso Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2017 - 2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	4.68	4.51	4.88	-0.29	4.44
2 Konsumsi LNPRT	2.26	6.83	6.57	1.14	1.50
3 Konsumsi Pemerintah	2.18	3.96	3.76	-4.84	0.40
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.91	5.40	5.57	-6.27	0.83
5 Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto	5.03	5.08	5.30	-1.36	3.49

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 5 Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bondowoso Menurut Pengeluaran (Persen), 2017 - 2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	133.54	138.60	141.84	144.21	147.34
2 Konsumsi LNPRT	140.67	146.12	147.83	148.64	150.05
3 Konsumsi Pemerintah	159.61	168.10	174.55	179.88	181.62
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	151.33	154.22	157.49	160.80	164.59
5 Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto	138.95	142.80	145.59	148.20	151.22

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

<https://bondowosokab.bps.go.id>

Lampiran 6 Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bondowoso Menurut Pengeluaran (Persen), 2017 - 2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	3.43	3.79	2.34	1.67	2.17
2 Konsumsi LNPRT	3.42	3.88	1.17	0.54	0.95
3 Konsumsi Pemerintah	5.48	5.31	3.84	3.05	0.96
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.21	1.91	2.13	2.10	2.36
5 Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto	2.80	2.77	1.95	1.80	2.04

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BONDOWOSO

Jalan Santawi No. 114 - Bondowoso

Email: bps3511@bps.go.id

Homepage: <http://bondowosokab.bps.go.id>

